

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat partisipasi anggota KTH Simpoholon pada seluruh tahap kegiatan HKm tergolong rendah dengan persentase sebanyak 74 responden (78,7%).
2. Karakteristik sosial ekonomi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, menunjukkan keragaman yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Mayoritas anggota berada pada usia produktif dengan tingkat pendidikan dominan SMP dan SMA, serta memiliki lahan cukup luas (8,71–11 ha) yang berpotensi untuk pengembangan usaha tani. Pendapatan sebagian besar responden berada pada kisaran menengah ke atas, meskipun kontribusi dari kegiatan HKm masih rendah. Tingginya jumlah tanggungan keluarga menjadi tantangan sekaligus potensi tenaga kerja, sementara tingkat kekosmopolitan menunjukkan keterbukaan terhadap informasi luar. Namun, aspek kepemimpinan dinilai belum optimal dan pemberian insentif belum berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun terdapat potensi besar dalam mendukung keberhasilan HKm, masih diperlukan perbaikan dalam kepemimpinan, kesinambungan insentif, dan peningkatan kapasitas anggota agar manfaat ekonomi dan ekologi dapat tercapai secara maksimal.
3. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi pada jumlah tanggungan, kekosmopolitan dan *leadership* berkorelasi dengan partisipasi, sedangkan pada umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan dan insentif tidak berkorelasi dengan partisipasi.

5.2 Saran

Adapun saran terkait penelitian yang dilakukan di KTH Simpoholon antara lain :

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sipoholon, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok tani hutan (KTH). Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang ada, pengelolaan sumber daya alam, serta tingkat partisipasi dalam setiap tahap pengelolaan hutan. Selain itu, hasil evaluasi perlu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
2. Para pengambil keputusan, pengelola, pelaksana, dan pendamping, disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program HKm. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada anggota KTH, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola hutan dengan prinsip berkelanjutan. Pengelola program HKm juga perlu memberikan insentif yang lebih nyata dan terukur, baik dalam bentuk dana hibah, subsidi, ataupun dukungan pemasaran produk hutan, agar anggota KTH merasa termotivasi untuk berpartisipasi lebih aktif .
3. Penelitian lanjutan sebaiknya difokuskan pada analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam kegiatan HKm, seperti akses terhadap pelatihan, dan hubungan antar anggota dalam kelompok. Penelitian juga perlu menggali potensi pengelolaan hutan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di Kecamatan Sipoholon, misalnya dengan memanfaatkan pengetahuan lokal masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.